



#AKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KOMISI YUDISIAL



2023 Biro Umum
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	19
A. Kontribusi Biro Umum pada Sasaran Program & Strategis Lembaga.....	19
B. Capaian Kinerja Biro Umum.....	25
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan & Alternatif Solusi.....	37
B. Realisasi & Efisiensi Anggaran.....	57
BAB IV PENUTUP.....	59



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO UMUM TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas

NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Biro Umum masih terus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi di tahun 2023. Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Biro Umum diberikan amanah untuk melaksanakan fungsi meliputi administrasi dan pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Ketatausahaan, Perlengkapan, Kerumahtanggaan, Pengadaan barang/jasa, Kerja sama, Administrasi Penghubung, dan Protokoler.

Di tahun 2023 ini Biro Umum telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kelembagaan dan Penetapan Kinerja. Pencapaian output dari kegiatan dilaksanakan oleh tujuh kepala subbagian/sub koordinator. Prestasi yang telah di raih Biro Umum pada tahun 2023 yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan *Audited* tahun 2022 penghargaan ini merupakan penghargaan ke-16 berturut-turut yang telah diperoleh Komisi Yudisial. Hal ini memberikan gambaran kepada kita semua bahwa Komisi Yudisial secara konsisten melakukan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran capaian per kegiatan masing-masing bagian sesuai dengan perencanaan yang dijabarkan di awal tahun selama tahun 2022 dan hasilnya mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 29 Februari 2024

Kepala Biro Umum,



Supriatna

BAB I. PENDAHULUAN

VISI DAN MISI BIRO UMUM

Visi Biro Umum dipastikan berkorelasi penuh dengan Visi untuk Komisi Yudisial dalam Renstra Komisi Yudisial periode 2020-2024, keterkaitan visi biro kepada Renstra lembaga dinilai dari pengaruhnya pada level sasaran program. Biro umum diposisikan pada program dukungan manajemen dan akan berkontribusi kepada 2 sasaran program, yaitu sasaran program pengelolaan organisasi yang efektif efisien dan manajemen SDM lembaga. Sehingga ditetapkan visi adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan manajemen perkantoran dan SDM lembaga yang berkualitas”

Visi akan diwujudkan melalui beberapa upaya besar yang akan dijabarkan dalam misi.

Mengacu pada *pointers* tersebut, maka misi Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yakni :

1. Memberikan pelayanan kepada *stakeholders* secara efektif dan akuntabel;
2. Meningkatkan pengelolaan SDM secara profesional dan proporsional.

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Komisi Yudisial periode 2020-2024 maka Biro Umum Komisi Yudisial sesuai dengan peran dan kewenangan dapat memberikan arah yang lebih tegas kepada Visi Misi melalui tujuan dan sasaran yang akan dicapai, Adapun Tujuan dan Sasaran Biro Umum Komisi Yudisial adalah sebagai berikut :

Tujuan

Terciptanya kepuasan *stakeholder* terhadap pelayananan manajemen perkantoran dan kinerja SDM Lembaga.

Sasaran

1. Meningkatnya layanan kinerja penghubung;
2. Tersedianya sarana prasarana internal dalam mendukung kinerja lembaga;
3. Terpenuhinya layanan umum dalam mendorong peningkatan efektifitas lembaga;
4. Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel;
5. Terwujudnya peningkatan mutu SDM lembaga.

A. Gambaran Biro Umum

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang lahir melalui Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001 yang termaktub dalam Pasal 24B UUD 1945. Dalam konstitusi Komisi Yudisial diberikan dua kewenangan konstitusional, yaitu untuk melakukan seleksi Calon Hakim Agung dan kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan

keluhuran martabat serta perilaku Hakim. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan *checks and balances* dalam kekuasaan kehakiman.

Untuk menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan amanat undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial membawahi bidang kerja masing-masing dengan dikoordinasikan oleh seorang Ketua Komisi Yudisial serta dibantu oleh kelompok tenaga ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 Sekretariat Jenderal merupakan aparatur pemerintah yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional kepada Komisi Yudisial dan bertanggungjawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Dimana Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial membawahi Lima Kepala Biro dan Satu Pusat. Dimana Biro Umum Komisi Yudisial merupakan salah satu unit eselon II yang membantu Sekretariat Jenderal dalam menjalankan tugasnya memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi Renstra Komisi Yudisial periode 2020-2024 yaitu *"Menjadikan Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim"*.

Adapun Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, protokoler, administrasi penghubung, perlengkapan, dan hubungan antar lembaga di lingkungan Komisi Yudisial. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengelolaan ketatausahaan, keprotokolan, dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan dan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. Pelaksanaan administrasi penghubung, kerjasama, dan hubungan antar lembaga;
- g. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Biro Umum dibagi menjadi empat bagian, antara lain sebagai berikut :

- a. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, dan kepegawaian, koordinasi dan fasilitasi dengan unit-unit

organisasi yang lain terhadap fungsi kearsipan, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan pimpinan, keprotokolan, dan kearsipan.

b. Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan keuangan.

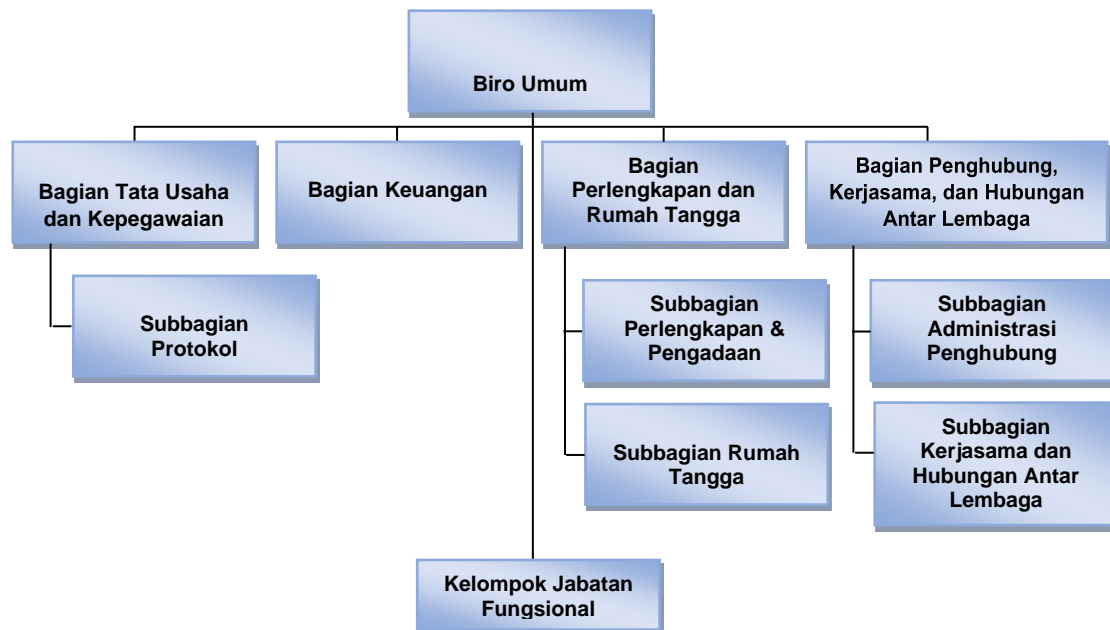
c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan, layanan pengadaan barang/jasa, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

d. Bagian Penghubung, Kerjasama, dan Hubungan Antar Lembaga.

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, administrasi penghubung dan kerja sama, dan hubungan antar lembaga, serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi penghubung, kerja sama, dan hubungan antar lembaga.

Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Biro Umum Komisi Yudisial



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2022 Biro Umum memiliki pegawai sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

1. Berdasarkan Jabatan

Tabel 1.1. Pegawai Biro Umum Berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Presentase (%)
Eselon II	1	1,96
Eselon III	4	7,84
Eselon IV	4	7,84
Fungsional Tertentu	15	29,41
Fungsional Umum	27	52,94
Total	51	100,00

2. Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1.2. Pegawai Biro Umum Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah	Presentase (%)
PNS	46	90,20
CPNS	2	3,92
PPPK	1	1,96
PPNPNS	2	3,92
Total	51	100

3. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.3. Pegawai Biro Umum Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	27	52,94
Perempuan	24	47,06
Total	51	100

4. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 1.4. Pegawai Biro Umum Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
S2	18	35,29
S1	24	47,06
D3	7	13,73
Lainnya	2	3,92
Total	51	100,00

C. Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Umum juga dihadapkan pada tantangan dan hambatan yang harus dihadapi dalam memberikan pelayanan dan dukungan terhadap Biro/Pusat yang lain. Adapun *issue* utama dalam menghadapi situasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.5. Issue Strategis Biro Umum Tahun 2023

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan BMN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak Barang Milik Negara (BMN) yang tidak terdeteksi keberadaannya; 2. Penatausahaan BMN yang belum optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kontrol dan pengawasan yang dilakukan terhadap BMN yang ada di lingkungan Setjen KY; 2. Kurangnya kesadaran pegawai akan pentingnya penatausahaan BMN; 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia di Bagian Perumga sehingga tidak dapat menjangkau ke seluruh unit kerja.
2.	Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skor Rendah nilai ITKP 2. Penyempurnaan Format Dokumen pemilihan keseluruhan dari PPK-1 s.d. PPK-6 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya Jabatan Fungsional Pengelola Barang/Jasa di KY; 2. Input SIRUP belum dipahami banyak pengelola keuangan 3. Sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa belum memadai.
3.	Penyelenggaraan urusan Rumah Tangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhambatnya penyelenggaraan urusan rumah tangga di karenakan karena keterbatasan budget 2. Pemenuhan fasilitas standar Klinik Pratama KY 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya alokasi anggaran; 2. Proses penyelesaian Hibah dari dana CSR BUMN.
4.	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Profesionalitas Pegawai belum sesuai target 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tantangan pada aspek pengembangan karir dan pengembangan sistem informasi manajemen talenta sama sekali belum terimplementasi
5.	Tata Usaha dan Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak tersedianya tempat penyimpanan arsip yang memadai 2. Terhambatnya proses pengarsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas gedung/ruang khusus arsip masih belum maksimal; 2. SDM yang terbatas berhadapan dengan beban berkas arsip bertahun-tahun lalu
6.	Keprotokolan	Penyelenggaraan keprotokolan pimpinan tidak maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya anggaran yang ada; 2. Terbatasnya SDM yang ada; 3. Kurangnya fasilitas berupa kendaraan protokol.
7.	Keuangan	Adanya aplikasi dari Kementerian Keuangan RI	Aplikasi SAKTI masih merupakan aplikasi terpusat dari Kementerian Keuangan dan masih memerlukan pengembangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
8.	Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial sudah tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan kerja sama dan pengaturan hubungan hubungan kerja dengan Mitra, sehingga perlu dilakukan pembahasan dan dilakukan revisi agar menyesuaikan dengan tahapan dan proses kerja sama; 2. Implementasi kerja sama antara Komisi Yudisial dengan Mitra terutama Mitra yang berasal dari Perguruan Tinggi kurang diberdayakan oleh Biro/Pusat Komisi Yudisial, sehingga ke depannya kerja sama yang akan dilaksanakan akan lebih selektif dan setiap kerja sama yang ada akan memiliki pengampu kegiatan dari Biro/Pusat sebagai penanggung jawab; 3. Proses pembahasan naskah kerja sama yang memakan waktu cukup lama akibat birokrasi sehingga lamanya proses formalisasi kerja sama, maka diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara Komisi Yudisial dengan Mitra; 4. Kurangnya sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sehingga diperlukan penambahan pegawai baik melalui jalur jasa lainnya maupun rekrutmen ASN/ PPPK. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu terhadap update peraturan belum dilaksanakan secara rutin dengan menyesuaikan padaproses kerja sama yang dilakukan saat ini; 2. Calon mitra kurang komunikatif dalam pelaksanaan koordinasi pembahasan kerja sama; 3. Belum adanya pengisian kembali terhadap staff yang sedang mengikuti tugas belajar ke luar negeri
9.	Administrasi penghubung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi dan internalisasi <i>E-Performance</i>; 2. Status Penghubung Komisi Yudisial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pandemi di Indonesia; 2. Belum tersusunnya Naskah Akademis Formulasi PPPK Penghubung KY-RI

D. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2023 terdiri dari 4 (Empat) Bab yaitu :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Biro Umum Tahun 2023, Visi Misi dan Sasaran Kegiatan, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Biro Umum Tahun 2023 serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023. Analisis capaian kinerja tahun 2023 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2023 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, langkahlangkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Biro Umum Tahun 2023 dan upaya yang akan dilakukan oleh Biro Umum dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah.

Tabel 2.1. Target Kinerja Biro Umum 2020 s.d. 2024

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Sasaran	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan, Kerja sama, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM					
Sasaran Kegiatan 1					
Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga					
Persentase kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	15%	15%	15%	15%	15%
Sasaran Kegiatan 2					
Meningkatnya kualitas layanan internal					
Penilaian penghubung berkinerja baik	Skor B	Skor B	Skor B	Skor B	Skor A
Layanan Administrasi Keuangan Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tingkat kepuasan layanan keuangan	PUAS	PUAS	PUAS	PUAS	PUAS
Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	80%	80%	80%	90%	100%
Tingkat kepuasan layanan umum (protokoler, tata usaha, rumah tangga)	CUKUP	CUKUP	Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	BAIK	BAIK	BAIK	Sangat Baik	Sangat Baik
Sasaran Kegiatan 3					
Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM					
Nilai Sistem Merit	Nilai 200	Nilai 230	Nilai 260	Nilai 290	Nilai 320
Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	77%	80%	82%	84%	86%
Sasaran Kegiatan 4					
Meningkatnya layanan perkantoran					
Tingkat kepuasan layanan perkantoran	PUAS	PUAS	PUAS	PUAS	PUAS

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga	Persentase kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	15%
2	Meningkatnya kualitas layanan internal	Penilaian penghubung berkinerja baik	Skor B
		Layanan Administrasi Keuangan Sesuai Standar	100 %
		Tingkat kepuasan layanan keuangan	PUAS
		Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	90%
		Tingkat kepuasan layanan umum (protokol, tata usaha, rumah tangga)	Memuaskan
		Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	Sangat BAIK
3	Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM	Nilai Sistem Merit	Nilai 290
		Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	84%
4	Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	PUAS

Kegiatan:

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan, Kerja sama, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di lingkungan Komisi Yudisial Alokasi anggaran TA 2023,

Anggaran:

Rp 116.259.587, -

Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Biro Umum 2020 s.d. 2024, yang berisi detail 4 sasaran kegiatan/output dengan uraian pada Bab IV tentang TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN serta Tabel 4.1. Target Kinerja Biro Umum 2020 s.d. 2024.

B. RENCANA KERJA BIRO UMUM TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu tahun tertentu. Rincian rencana kerja Biro Umum tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Rencana kerja tahun 2023
Biro Umum**

Kode	Sasaran Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output/ Komponen	Tahun 2023			Alokasi 2023 (Rp Ribu)
		Volume / Target	Satuan	Satuan Biaya	
100.01.WA	Program Dukungan Manajemen				116.259.587
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerjasama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial				116.259.587
3867.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53	Dokumen		4.185.000
3867.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	29	Dokumen		4.185.000
3867.EBD.953.051	Laporan Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial	1	Dokumen	798.484	724.802
3867.EBD.953.052	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penghubung Komisi Yudisial	12	Dokumen	70.482,3	845.788
3867.EBD.953.053	Implementasi Rekomendasi Hasil Evaluasi Penghubung Komisi Yudisial	1	Dokumen	2.489.410	2.489.410
3867.EBD.953.054	Laporan dan evaluasi Kinerja Biro Umum	15	Dokumen	8.133	125.000
3867.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Base Line)	869	Unit		7.069.901
3867.EBB.951	Layanan Sarana Internal	869	Unit		7.069.901
3867.EBB.951.051	Pengadaan Peralatan dan Mesin	869	Unit	8.135,7	7.069.901
3867.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	0	Unit		0,00
3867.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	53	Layanan/Laporan/Dokumen		2.250.000
3867.EBA.001	Layanan Tata Usaha	13	Laporan		200.000
3867.EBA.001.051	Perencanaan Layanan Tata Usaha	1	Laporan	45.080	45.080
3867.EBA.001.052	Pelaksanaan Layanan Tata Usaha	12	Laporan	12.910	154.920
3867.EBA.001.053	Pelaksanaan Pendampingan, Bimbingan Teknis dan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	1	Laporan	50.000	50.000
3867.EBA.956	Layanan BMN	3	Dokumen		600.000
3867.EBA.956.051	Penatausahaan BMN	2	Dokumen	247.520	495.040
3867.EBA.956.052	Perencanaan Kebutuhan BMN untuk Pengadaan dan Pemeliharaan BMN Tahun 2025	1	Dokumen	104.960	104.960
3867.EBA.959	Layanan Protokoler	13	Laporan		600.000
3867.EBA.959.051	Perencanaan Kegiatan Layanan Protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara	1	Laporan	50.759	50.759
3867.EBA.959.052	Pelaksanaan kegiatan layanan protokol pimpinan, kelembagaan dan pelaksanaan upacara	12	Laporan	45.770,1	549.241
3867.EBA.962	Layanan Umum	19	Laporan		600.000
3867.EBA.962.051	Analisis Kebutuhan Urusan Rumah Tangga	1	Laporan	58.008	58.008

3867.EBA.962.052	Pengelolaan urusan rumah tangga	6	Laporan	67.141,2	402.847
3867.EBA.962.053	Monitoring Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga	12	Laporan	11.595,4	139.145
3867.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53	Dokumen /Layanan/Laporan		350.000
3867.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	7	Dokumen		350.000
3867.EBD.974.051	Perencanaan Pengelolaan Kearsipan	1	Dokumen	41.214	41.214
3867.EBD.974.052	PElaksanaan Pengelolaan Kearsipan	6	Dokumen	51.464,3	308.786
3867.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53	Dokumen /Layanan/Laporan		1.400.000
3867.EBD.955.051	Pengelolaan Keuangan dan kinerja	1	Dokumen	284.514	284.514
3867.EBD.955.052	Laporan Pelaksana Urusan Perbendaharaan	5	Dokumen	120.919,2	604.596
3867.EBD.955.053	Penyusunan Laporan Keuangan	5	Dokumen	61.435	307.175
3867.EBD.955.054	Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Keuangan	1	Dokumen	203.715	203.715
3867.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (Base Line)	528	Orang/layanan		3.400.099
3867.EBC.001	Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	60	Orang		650.000
3867.EBC.001.051	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	60	Orang	10.833,3	650.000
3867.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	234	Orang		1.299.068
3867.EBC.954.051	Pengelolaan Administrasi	234	Orang	1.087,1	254.380
3867.EBC.954.052	Pengelolaan Sistem Merit	234	Orang	1.475,8	345.340
3867.EBC.954.053	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sistem Merit	234	Orang	2.988,7	699.348
3867.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	234	Orang		1.451.031
3867.EBC.996.051	Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai	234	Orang	6.201	1.451.031
3867.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	53	Dokumen /Layanan/Laporan		1.450.000
3867.EBD.001	Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga	5	Laporan		1.450.000
3867.EBD.001.051	Pelaksanaan Koordinasi Kerjasama Antar Lembaga	4	Dokumen	130.939,3	523.757
3867.EBD.001.052	Pelaksanaan Kerjasama dan hubungan Antar Lembaga	4	Dokumen	117.018,3	468.073
3867.EBD.001.053	Implementasi Kerjasama Internasional	1	Dokumen	458.170	458.170
3867.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	53	Layanan/Laporan/Dokumen		96.154.587
3867.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		96.154.587
3867.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	43.676.357	43.676.357
3867.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	52.478.230	52.478.230

C. **HASIL RAPAT KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2023**

Pada bulan Februari tahun 2023, Komisi Yudisial telah menyelenggarakan Rapat Kerja, dimana dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial menghasilkan beberapa agenda sebagai *quick wins* dalam mencapai visi dan misi Komisi Yudisial. Agenda tersebut adalah sebagai berikut:

KOMITMEN RAPAT KERJA KOMISI YUDISIAL TAHUN 2023

Hasil Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2023 menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Dokumen Rencana Kerja, Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran serta Target kinerja sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan wewenang, fungsi dan tugas Komisi Yudisial Tahun 2023;
2. Menyiapkan instrumen penjamin mutu, monitoring dan evaluasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2023 yang secara periodik dilaporkan setiap bulannya;
3. Mengupayakan adanya nilai tambah dari penghargaan –penghargaan yang telah diperoleh agar dapat memberikan dampak positif bagi lembaga dan pegawai Komisi Yudisial;
4. Melakuakn periapan kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) baik dari Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta tata laksana;
5. Melakukan penguatan koordinasi antar Biro/Pusat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
6. Melakukan penataan dan penyempurnaan proses bisnis serta struktur organisasi dan tata kerja yang jelas untuk dijadikan acuan/panduan dalam pelaksanaan tugas sehingga menghasilkan Standar Operasional PROsedur (SOP) yang valid dan terukur, sehubungan dengan adanya Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

a. Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum dan Litbang.

- Sumber Daya Manusia
 - a) MEnetapkan prioritas dan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pengembangan pegawai yang berdasarkan dengan kebutuhan dan individu pegawai;
 - b) Meningkatkan Indeks Profesional ASN;
 - c) Membangun komitmen bersama dalam peningkatan kompetensi pegawai dengan meamsukkan standar minimal 20 JP per tahun ke dalam SKP;
 - d) Melaksanakan pengisian jabatan struktural berdasarkan sistem meritokrasi secara terbuka, objektif dan transparan; dan
 - e) Penguatan sistem merit dengan implementasi manajemen talenta untuk mewujudkan Komisi Yudisial sebagai organisasi yang *excellent* (oraganisasi modern).

b. Bidang Hubungan Antar lembaga dan Layanan Informasi

- Hubungan Antar Lembaga.
Kualitas dan efektifitas kerja sama antar lembaga perlu ditingkatkan melalui;
 - a) Melakukan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerja Sama;
 - b) Memperkuat peran *civil society* dengan menjajaki dan membangun kerja sama antara KY dan organisasi non pemerintah;
 - c) Melakukan koordinasi dengan Bagian TU dan Kepegawaian terkait penyusunan sistem magang yang lebih dalam rangka tindak lanjut kerja sama yang telah dilakukan oleh KY dengan universitas; dan
 - d) Mendorong penyelesaian MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KY dan MA tentang pertukaran data hakim sehingga database yang dibangun memiliki kemanfaatan strategis dalam menyediakan rakam jejak guna kepentingan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial.

- Penghubung
 - a) Melakukan pengelolaan aset-aset penghubung serta penambahan fasilitas kantor penghubung;
 - b) Peningkatan kapasitas SDM Penghubung dengan Pelatihan 20 Jam dalam 1 Tahun adalah latasan minimal. Perlu ditingkatkan kemampuan SDM baik dari sisi Peningkatan Pengetahuan Administrasi maupun Substansi Teknis; dan
 - c) Penggunaan/Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Penghubung 20 Wilayah dengan Mengoptimalkan Penggunaan Office 365

Bandung, 17 Februari 2023
SEKRETARIS JENDERAL,


Arie Sudihar

Mengetahui,

KETUA,

Mukti Fajar Nur Dewata

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Pencapaian kinerja adalah hasil kinerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Biro Umum, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada BAB II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat sebagai berikut:

A. KONTRIBUSI BIRO UMUM DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS LEMBAGA

Biro Umum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya memberikan beberapa kontribusi pada Sasaran Program dan Sasaran Strategis Komisi Yudisial, sebagai berikut:

a) Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Tabel 3.1. Kontribusi Biro Umum dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
6	Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien	Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi	Baik	- Opini BPK - Nilai Kinerja Penghubung - Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI - Nilai kepuasan layanan keuangan - Nilai pelaksanaan adm keuangan [IKPA] - Nilai kepuasan layanan umum
7	Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga	Indeks profesionalisme pegawai	Indeks 65	Nilai berdasarkan IPPNS BKN

I. Sasaran Program ke 6 : Terkelolanya Organisasi yang efektif dan efisien

Indikator dari sasaran program ke-6 adalah Predikat Baik terhadap pengelolaan organisasi dengan target kinerja bernilai Baik. Berdasarkan dokumen LAKIP Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI tahun 2022, diketahui bahwa rumus hitung pengukuran indikator tersebut diambil berdasarkan rata-rata capaian beberapa variabel yaitu :

- 1) Penghargaan Menuju Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik
- 2) Opini atas laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian”
- 3) Nilai kinerja penghubung
- 4) Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI

- 5) Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan biro umum
- 6) Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- 7) Tingkat kepuasan layanan umum [Protokol – Tata Usaha – Rumah Tangga]
- 8) Indeks Kepuasan Masyarakat

Maka berdasarkan rujukan dimaksud, Biro umum berkontribusi berturut-turut pada poin 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2. Kontribusi Biro Umum pada Indikator Predikat Baik Pengelolaan Organisasi

INDIKATOR	2023	
	REALISASI	SKOR
1) Opni BPK	WTP	100
2) Penilaian penghubung berkinerja baik	A	88.63
3) Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar	100 %	100
4) Tingkat kepuasan layanan keuangan	A	91.26
5) Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]	BAIK / PUAS	85.6
6) Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	AA	94.46

Dengan Rumus hitung:

$$\text{Kontribusi Biro Umum} = \frac{\text{Jumlah skor IKK kontributor}}{\text{Jumlah sumber IKK}} = \text{Hasil Kontribusi}$$

Maka hasil penghitungannya menjadi :

$$= \frac{100 + 88.63 + 100 + 91.26 + 85.6 + 94.46}{6 \text{ Indikator}} = 93.32$$

Masih berdasarkan rujukan yang sama, yaitu predikat pengelolaan organisasi pada LAKIP Setjen 2023 maka letak kontribusi biro umum berada pada predikat SANGAT BAIK, sebagaimana berikut:

Tabel 3.3. Predikat Pengelolaan Organisasi

Skor	Predikat
91-100	Sangat Baik
71-90	Baik
51-70	Cukup
26-50	Buruk
00-25	Sangat Buruk

II. Sasaran Program ke 7: Meningkatkan Profesionalisme SDM Lembaga

Sasaran program ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai dengan target Indeks 70 Indeks ini diperoleh berdasarkan hasil penilaian dari BKN.

Dalam upaya memperoleh indeks profesionalisme pegawai, berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan

Pengukuran Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara pada Pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Berdasarkan IPPNS BKN pertanggal 6 November 2023 capaian Indeks Profesionalisme Pegawai tahun 2022 Komisi Yudisial pada posisi indeks 81.58, dengan detail sebagai berikut:

Tabel 3.4. Detail Indeks Profesionalisme ASN di KY

Instansi	Tahun Ukur	Jumlah PNS Di ukur	DIMENSI				NILAI
			Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
Setjen Komisi Yudisial	2022	191	16.36	11.13	22.46	4.9	54.84
	2023	193	21.52	30.47	24.59	5.0	81.58

Perkembangan signifikan ditemui pada Indeks Profesionalitas ASN, dimana pada tahun 2023 Komisi Yudisial mendapati hasilnya pada Kategori TINGGI dengan nilai **81.58**. Hal ini merupakan lonjakan yang jauh dari tahun sebelumnya yaitu 50.53 dengan kategori SANGAT RENDAH. Beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai kenaikan signifikan ini, seperti:

- Terdapat perubahan komponen penilaian di BKN pada dimensi kualifikasi, sebelumnya kualifikasi tidak menyesuaikan jabatan, saat ini dibuat menyesuaikan jabatan
- Pada tahun sebelumnya di Komisi Yudisial tidak terdapat program pengembangan SDM, sehingga perolehan nilai menjadi sangat kecil. Program pengembangan mulai dinisiasi pada tahun 2022 dan berlanjut hingga saat ini.

b) Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial

Tabel 3.5. Kontribusi dalam Sasaran Strategis Komisi Yudisial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data)
2	Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal	Nilai akuntabilitas kinerja lembaga mencapai predikat Sangat Baik	Baik	Surat Menpan terkait hasil nilai SAKIP
		Nilai indeks reformasi birokrasi mencapai kategori "A" di tahun 2024	A	Surat Menpan terkait hasil evaluasi RB K/L

Capaian kinerja pada sasaran strategis yang merupakan kontribusi Biro Umum pada **2023** dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program ke 2: Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal

Sasaran Strategis ini diukur melalui indikator kinerja:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga dengan target **Baik**.
2. Nilai indeks reformasi birokrasi dengan target **A**.

Biro Umum sebagai unit kerja setingkat eselon 2, pada pencapaian Sasaran Strategis Komisi Yudisial ke 2, dicapai melalui:

1. Kontribusi : Nilai Akuntabilitas Kinerja Lembaga dengan target **Baik**.

Agenda penting dalam reformasi birokrasi adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat maka Biro Umum melakukan berbagai kegiatan yang dapat mendukung peningkatan pelayanan tersebut antara lain:

- a. kegiatan memperkuat kerja sama dan hubungan antar lembaga;
- b. kegiatan layanan kinerja penghubung;
- c. kegiatan layanan manajemen keuangan;
- d. kegiatan layanan sarana dan prasarana internal;
- e. kegiatan layanan umum;
- f. kegiatan layanan pengelolaan dan pengembangan SDM;
- g. Layanan perkantoran.

Kegiatan- kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh biro umum agar dapat terwujudkannya pengelolaan organisasi yang efektif dan efisiensi. Terkelolanya organisasi yang efektif dan efisiensi merupakan upaya yang dilakukan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas manajemen Internal dengan predikat baik yang ada di Komisi Yudisial.

Kemudian Kontribusi yang dilakukan oleh Biro Umum dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja instansi di Komisi Yudisial adalah dengan ikut terlibat dalam Tim Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dimana Biro Umum mendapatkan tugas sebagai berikut:

- a. Tim Koordinator Bidang Evaluasi Kinerja Pegawai

Tim koordinator bidang evaluasi kinerja pegawai memiliki tugas untuk merancang konsep mekanisme pemberian penghargaan atas capaian kinerja pegawai, berkoordinasi dengan Tim Koordinator bidang perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja terkait dengan keselarasan/integrasi dokumen perjanjian kinerja individu dan sasaran kinerja pegawai

(SKP) dan terkait keselarasan implementasi pengukuran dan evaluasi kinerja sampai dengan level individu.

b. Pelaksana SAKIP pada Biro/Pusat

Pelaksana SAKIP pada Biro/Pusat memiliki tugas untuk menyusun, mengukur, mereviu, dan mengevaluasi Renstra Biro/Pusat, menyusun rencana kerja Biro/Pusat, mengkoordinasi/menyusun dan mereviu perjanjian kinerja eselon II, III, IV sampai dengan level individu dengan berpedoman kepada Rencana Strategi Komisi Yudisial RI dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI, serta Rencana Strategi Biro/Pusat, mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja setiap bulan, mengelola data kinerja, mengkoordinasikan/menyusun laporan bulanan, mengkoordinasikan/menyusun laporan kinerja, melakukan pengendalian dan evaluasi implementasi SAKIP di unit kerja

c. Berdasarkan hasil laporan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (Sistem AKIP) pada tahun 2022, Biro Umum memperoleh nilai evaluasi Sistem AKIP sebesar 80,50 dengan kategori A. Penilaian tahun 2022 ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini merupakan bentuk dukungan dan kontribusi yang diberikan oleh Biro Umum.

2. Kontribusi: Nilai indeks reformasi birokrasi dengan target **A**.

Reformasi birokrasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek- aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), sumber daya manusia (aparatur). Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang turut serta memiliki kewajiban dalam memperbaiki reformasi birokrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, maka target sasaran strategis ke 2 Komisi Yudisial tahun 2023 adalah indeks reformasi birokrasi dengan target A. Untuk mencapai target tersebut maka Biro Umum melakukan serangkaian kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target sasaran tersebut antara lain yaitu:

a. Ikut terlibat dalam Tim Reformasi Birokrasi baik di RB Pusat dan Unit

b. Dalam penguatan organisasi Biro Umum, telah melakukan evaluasi atas proses bisnis dan struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kinerja di Lingkungan Komisi Yudisial khususnya di Biro umum. Dan telah dilakukan

penyederhanaan birokrasi di Biro Umum, dimana dibagian keuangan dan kepegawaian telah menjadi jabatan fungsional.

- c. Untuk mendukung penguatan akuntabilitas di Biro Umum, maka biro umum telah menetapkan target kinerja yang termuat dalam perjanjian kinerja, kemudian membuat laporan periodik untuk dapat memberikan penjelasan target yang telah dicapai oleh Biro Umum.
- d. Upaya yang dilakukan oleh Biro umum untuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme adalah dengan meningkatnya layanan manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang ada di Komisi Yudisial dikelola dengan tertib, transparan dan memenuhi aspek peraturan perundang- undangan terkait pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan yang ada di Komisi Yudisial telah memenuhi aspek pemenuhan peraturan perundang- undangan hal ini dapat dilihat bahwa pengelolaan keuangan di Komisi Yudisial TA 2022 telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Seluruh rangkaian kegiatan terkait akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Biro Umum diupayakan dalam rangka mendukung pencapaian target Sasaran Strategis ke 2 Komisi Yudisial tahun 2023.

B. CAPAIAN KINERJA BIRO UMUM

Biro Umum pada tahun 2023 telah melaksanakan kinerja secara maksimal untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Selama tahun anggaran 2023 Biro umum telah melaksanakan beberapa capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6. Tabulasi Induk Capaian Kinerja Biro Umum 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	SATUAN	2023		
					TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Penguatan Kerja sama dan hubungan antar lembaga	Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga	1) Persentase kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	Persentase	Naik sebesar 15% = 60%	84,61 %	141%
2	layanan kinerja penghubung	Meningkatnya kualitas layanan internal	2) Penilaian penghubung berkinerja baik	Skor	B [batas atas 86%]	A [sangat baik = 88.63%]	103%
3	Layanan manajemen keuangan		3) Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar	Persentase	100 %	100 %	100 %
4	Layanan Sarana dan Prasarana internal		4) Tingkat kepuasan layanan keuangan	Kategori	Puas [Batas atas 88.3]	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 91.26]	103%
5	Layanan Umum		5) Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	Persentase	90 %	98.3%	109%
			6) Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]	Kategori	PUAS [Batas atas 88.3]	PUAS [Skor = 85.6]	96.9%
			7) Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	Kategori	Sangat Baik /A [Batas bawah 91]	AA / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 94.46]	103.8%
6	Pengelolaan dan Pengembangan SDM		Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM	8) Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018]	Nilai	290	345
			9) Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	Persentase	PUAS [Target 88,3]	PUAS [Skor 85.94%]	97.3%
7	Layanan perkantoran	Meningkatnya layanan perkantoran	10) Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Kategori	Puas [batas atas 88.3]	PUAS [Skor = 84.94]	96.1%

Berikut rincian analisis capaian masing-masing sasaran kinerja pada Biro Umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Kinerja 1 - Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga

Kegiatan Penguatan Kerja sama & Hubungan Antar Lembaga

Capaian kinerja Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun tergambar dari hasil capaian LAKIP Komisi Yudisial. Secara umum kinerja Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga sudah menunjukkan peningkatan pencapaian kinerja, dimana target pada indikator dimaknai dengan peningkatan sebesar **15% (lima belas persen)** setiap tahunnya, hal ini didasarkan pada redaksional sasaran keluaran berupa meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga, yang berarti gradasi target menjadi sebagai berikut:

Tabel 3.7. Gradasi Target Tindak lanjut Kerja Sama

2020	2021	2022	2023	2024
15%	30%	45%	60%	75%

Sehingga sasaran target kinerja ini memiliki parameter pada jumlah kerja sama yang mendukung upaya peningkatan Integritas Hakim dengan rumus sebagai berikut:

Tabel 3.8. Indikator Kinerja Kegiatan ke -1

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
1	Penguatan Kerja sama dan hubungan antar lembaga	Persentase kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	Persentase	Naik sebesar 15% = 60%	Indikator diukur dari perbandingan jumlah kerja sama dengan konten yang jelas mendukung pelaksanaan upaya peningkatan integritas hakim, dengan jumlah kerja sama yang diresmikan sekaligus ditindaklanjuti	$IKU \text{ Kerjasama \& Hubla}$ $= \frac{\text{Jumlah Kerja sama yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Kerja sama dengan konten Integritas Hakim}} \times 100\%$

Selama tahun 2023, telah terlaksana 28 (dua puluh delapan) penandatanganan naskah kerja sama, yang terdiri dari 7 kerja sama dengan Lembaga/Badan dan 21 kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Dari total 28 kerja sama yang telah ditandatangani tersebut, terdapat 26 kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim dan 22 diantara merupakan kerja sama yang telah di implementasikan oleh unit kerja Biro/Pusat bersama dengan Mitra.

Berdasarkan data tersebut diatas, target pada tahun 2023 sebesar 60%, dengan rumus penghitungan capaian target pada indikator kinerja adalah dengan cara mengukur perbandingan

antara jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti dengan kerja sama dengan konten integritas hakim yaitu sebesar 84,61%, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Tabel Penghitungan Indikator Kerja Sama

VARIABEL UKUR	JUMLAH	PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA
Rekapitulasi Jumlah kerja sama yang ditindaklanjuti	22	<i>IKU Kerjasama & Hubla</i> = 22/26 x 100% = 84,61%
Rekapitulasi jumlah kerja sama dengan konten integritas hakim	26	

Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga pada tahun 2023 telah melaksanakan kinerja secara maksimal untuk mencapai seluruh target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Komisi Yudisial melalui Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga selama tahun 2023 telah menjalin kerja sama dengan Mitra sebagai berikut:

Tabel 3.10. Mitra Kerja Sama Komisi Yudisial Tahun 2023

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAKLANJUT
1.	Jakarta	PT Pos Indonesia	Jasa Pengiriman Surat dan/atau Paket	2 Januari 2023	Pengiriman dokumen, bahan publikasi dan lainnya
2.	Jakarta dan Surabaya	Universitas Airlangga	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	12 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
3.	Jakarta	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Peningkatan Integritas dan Kapasitas Hakim Dalam Rangka Optimalisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perpajakan	16 Januari 2023	Terkait dengan pemantauan persidangan kasus pajak
4.	Jakarta dan Solo	Universitas Sebelas Maret	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
5.	Jakarta	Jimly School of Law and Government	Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Fungsi untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Hakim Berintegritas	16 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
6.	Jakarta dan Yogyakarta	FH. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	24 Januari 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
7.	Jakarta	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat	Penilaian Kesehatan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Komisi Yudisial RI	31 Januari 2023	Pelaksanaan seleksi Kesehatan CHA dan Hakim Ad Hoc di Komisi Yudisial
8.	Jakarta dan Riau	Universitas Islam Riau	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	30 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAKLANJUT
9.	Jakarta dan Bandung	Universitas Kristen Maranatha	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
10.	Jakarta dan Bali	Universitas Hindu Indonesia	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Maret 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
11.	Jakarta dan Lampung	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	6 April 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
12.	Jakarta dan Bali	Universitas Udayana	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	4 Mei 2023	Pelaksanaan Program Klinik Etik dan Advokasi
13.	Jakarta dan Manado	Universitas Sam Ratulangi	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	25 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa, Program Klinik Etik dan Advokasi
14.	Jakarta dan Bali	Universitas Pendidikan Ganesha	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	16 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
15.	Jakarta dan Cirebon	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	23 Mei 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
16.	Jakarta dan Riau	Universitas Muhammadiyah Riau	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	06 Juni 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
17.	Jakarta	LPP-RRI	Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Bersih Melalui Program Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	5 Juli 2023	Pelaksanaan Edukasi Publik melalui program talkshow di RRI Pro 3 FM
18.	Yogyakarta	Universitas Gadjah Mada	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tridharma Perguruan Tinggi	26 Juli 2023	Pelaksanaan tugas belajar pegawai KY
19.	Jakarta	Komisi Pemberantasan Korupsi	Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menjaga, Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim	24 Agustus 2023	Pelaksanaan tukar menukar data dan/atau informasi
20.	Kendari	Universitas Sulawesi Tenggara	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
21.	Kendari	Universitas Muhammadiyah Buton	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
22.	Kendari	Universitas SembilanBelas November Kolaka	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
23.	Kendari	IAIN Kendari	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
24.	Makassar	STAI AL-AZHAR GOWA	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	25 September 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
25.	Kendari	Universitas Muhammadiyah Kendari	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	5 Oktober 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
26.	Jakarta	Komisi Pemilihan Umum	Sinergisitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim Serta Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan	08 November 2023	Pelaksanaan Pemantauan Perkara Pemilu

NO	WILAYAH	INSTANSI	KERJA SAMA	TANGGAL	TINDAKLANJUT
			Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota		oleh Komisi Yudisial
27.	Ternate	Universitas Khairun Ternate	Peningkatan Integritas Hakim Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih dan Tri Dharma Perguruan Tinggi	15 November 2023	Pelaksanaan Magang Mahasiswa
28	Jakarta	Lembaga Administrasi Negara	Penguatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara dan Kelembagaan Melalui Penyelenggaraan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Serta Pendidikan Tinggi Terapan	28 November 2023	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat Fungsional Penata Kehakiman KY

Analisis Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga

1) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Pada tahun 2022 Indikator Kerjasama antar lembaga, mampu melebihi target sebesar 36,82%, meski begitu capaian ini relatif sama atau stabil dengan tahun sebelumnya meski dengan perbandingan yang berbeda, sebagai berikut:

Aspek & Periode	2022	2023
Target	45%	60%
Realisasi	81.82%	84.61%
Capaian	181.8%	141%

2) Analisis Perbandingan Capaian dan Realisasi dengan beberapa tahun sebelumnya (2020 s.d. 2023)

Tren yang terjadi pada setidaknya 3 tahun terakhir pada sasaran ini cukup unik, dimana dari sisi besaran realisasi mengalami kenaikan signifikan namun dari sisi persentase capaian justru mengalami penurunan yang juga konsisten, hal ini salah satunya disebabkan oleh karakteristik target yang terus mengalami kenaikan, sehingga pembagi dalam penghitungan capaian menjadi semakin besar.

Aspek & Periode	2020	2021	2022	2023
Target	15%	30%	45%	60%
Realisasi	57.14%	54.54%	81.82%	84.61%
Capaian	380%	181.8%	181.8%	141%

3) Analisis Perbandingan dengan Kinerja Level Nasional

Sementara ini untuk sektor kerjasama dan hubungan antar lembaga relatif belum ditemukan rujukan indikator yang menjadi acuan secara nasional.

4) Analisis keberhasilan/kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternatif Solusi

Hasil pada sisi ini terjadi karena adanya gradasi pada Indikator kinerja yang dimaknai sebagai peningkatan, dimana angka 15% pada target kinerja dibaca bukan sebagai satuan yang konstan, melainkan akumulatif. Sehingga yang dimaksud 15% kerja sama ditindaklanjuti di baca sebagai kenaikan sejumlah 15% setiap tahunnya dari persentase tahun sebelumnya, yang berarti pada tahun 2023 target kinerjanya adalah 60% kerja sama ditindaklanjuti. Sasaran kinerja Meningkatnya kerja sama dan hubungan antar lembaga, melebihi target dengan persentase sebesar 84.61%, namun angka ini relatif lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, namun dari sisi capaian relatif menurun dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan besaran target yang juga meningkat sebesar 60%.

Hambatan dan permasalahan

Dalam mencapai sasaran kinerja ini ditemukan beberapa kendala, antara lain:

- Proses kerja sama yang dilakukan (*existing*) sudah tidak dapat diakomodasi oleh Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial.
- Dalam proses pembahasan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Badan, calon mitra kurang responsif dalam menindaklanjuti hasil kesepakatan pembahasan kerja sama untuk dapat ditandatangani baik secara seremonial atau *desk to desk*. Perlu dilakukan koordinasi percepatan formalisasi kerja sama agar segera dapat diimplementasikan oleh masing-masing pihak.
- Masih kurangnya sumber daya manusia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan.

Langkah-langkah antisipatif yang diambil

Sementara beberapa langkah yang ditempuh untuk meminimalisir hambatan di atas, antara lain:

- Reviu terhadap update peraturan belum dilaksanakan secara rutin dengan menyesuaikan pada proses kerja sama yang dilakukan saat ini;
- inisiatif pengadaan jasa lainnya melalui kontrak tenaga pendukung administrasi melalui mekanisme pengadaan barang/jasa

5) Analisis Perbandingan dengan Kinerja Level Nasional

Sementara ini untuk sektor kerjasama dan hubungan antar lembaga relatif belum ditemukan rujukan indikator yang menjadi acuan secara nasional.

6) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian output	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO	Efisiensi RO Satker= $\frac{\sum((AAKRO \times (\prod CRO)^{(1/n)) - RAKRO) / \sum(AAKRO)}$
100%	1.450.000.000	1.443.321.115	100,0%	1.450.000.000	6.678.885	0,46%

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya, rentang nilai diukur dari - 20% s.d. 20%, semakin minus semakin buruk, semakin mendekati 20% semakin baik. Dalam hal ini Layanan Kerjasama memiliki efisiensi anggaran dengan nilai terkecil dibandingkan dengan layanan yang lain.

7) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Meski dari sisi capaian indikator ini tetap bisa mencapai atau bahkan melampaui target kinerja, namun ada permasalahan strategis yang belum kunjung diselesaikan terkait instrumen yang mengatur kerjasama dan hubungan antar lembaga, yaitu terkait 1. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial sudah tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan kerja sama dan pengaturan hubungan hubungan kerja dengan Mitra, sehingga perlu dilakukan pembahasan dan dilakukan revisi agar menyesuaikan dengan tahapan dan proses kerja sama;

2. Sasaran Kinerja Meningkatnya kualitas layanan internal

a. Kegiatan layanan kinerja penghubung

Tabel 3.11. Indikator Kinerja Kegiatan ke -2

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
2	layanan kinerja penghubung	Penilaian penghubung berkinerja baik	Skor	B	Skor didapat dari penjumlahan capaian es-III (internal) dengan hasil survei kepuasan stakeholder (eksternal). Dengan bobot: 70% Internal dan 30% Eksternal.	(Hasil skor Internal [70%] + Hasil skor Eksternal/Survei [30%] : 2) Skor Internal didapat dari rata-rata penjumlahan persentase capaian es-III: Skor Eksternal didapat dari hasil survei kepuasan stakeholder (eksternal) Interval indeks menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: • A (86% - 100%), • B (71% - 85%), • C (56% - 70%), • D (41% - 55%)

Capaian kinerja kegiatan layanan kinerja penghubung diperoleh dengan membandingkan antara penetapan target dengan realisasi kinerja di 12 Wilayah Penghubung Komisi Yudisial. Adapun target kinerja berdasarkan sasaran kinerja penghubung yang terdiri dari 11 unsur penilaian, Adapun hasil penilaian capaian kinerja penghubung Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **88,63%**.

Dasar hukum pelaksanaan survei ini adalah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Berdasarkan hasil survey diperoleh Penilaian Penghubung Berkinerja Baik Tahun 2023 adalah sebesar 88,63% dengan rentang nilai absolut (≥ 86) serta termasuk kedalam **Predikat A** dengan interpetasi **Sangat Baik**.

b. Kegiatan Layanan manajemen keuangan

Bagian Keuangan khususnya dan Komisi Yudisial secara kelembagaan telah berhasil meraih penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-16 berturut- turut atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial tahun anggaran 2022 Dengan indikator pelayanan sesuai standar sebagai berikut:

Tabel 3.12. Indikator Kinerja Kegiatan ke -3

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
3	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar	Persentase	100%	Indikator Kinerja Pelaksanaan keuangan sesuai dengan standar dari Kementerian Keuangan	<p><i>IKU Layanan Adm Keuangan</i></p> $= \frac{\text{Jumlah layanan sesuai standar}}{\text{Jumlah Layanan dilaksanakan}} \times 100\%$

Sepanjang tahun 2023 bagian keuangan memiliki tugas untuk menyelesaikan sebanyak 12 Dokumen yang wajib memenuhi standar keuangan negara sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sebagai berikut:

1. Dokumen layanan verifikasi dan monitoring pertanggungjawaban keuangan,
2. Dokumen pengelolaan penerimaan dan pengembalian belanja,
3. Dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara,
4. Dokumen monitoring pengawasan pengelolaan uang persediaan (UP) dan tambahan uang persediaan (TUP),
5. Dokumen penghasilan dan potongan pajak perorangan tahun 2022
6. Dokumen laporan penghasilan dan potongan pajak perorang tahun 2022,
7. Dokumen hasil reuiu rencana penarikan dana tahun 2023
8. Dokumen laporan keuangan semester I tahun 2023,
9. Dokumen laporan keuangan triwulan tahun 2023,
10. Dokumen laporan keuangan unaudited tahun 2022,
11. Dokumen laporan keuangan audited tahun 2022,
12. Dokumen pengelolaan dan pemeliharaan data sistem informasi keuangan (aplikasi)

Tabel 3.13. Indikator Kinerja Kegiatan ke -4

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
4	Layanan Manajemen Keuangan	Tingkat kepuasan layanan keuangan	Kategori	Puas	Indikator pengukuran diperoleh dari kepuasan pihak diluar bagian keuangan [tidak terbatas hanya pada berbeda unit kerja/biro] terhadap pelayanan yang dilakukan.	Skor Di dapat dari survei internal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% - 85%), • Cukup Puas (56% - 70%), • Kurang Puas (41% - 55%)

Terkait dengan tingkat kepuasan layanan keuangan dengan target puas dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode survei dan yang menjadi objek survei adalah pengelolaan keuangan di Komisi Yudisial. Yang menjadi responden adalah pejabat pengelola keuangan yang ada dilingkungan Komisi Yudisial. Bagian keuangan telah melakukan survei dibulan November 2023 dengan koresponden pengelola keuangan di Lingkungan Komisi Yudisial sebanyak 34 orang yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah bayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), staf KPA, staf PPK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja (POKJA). Berdasarkan hasil survei layanan manajemen keuangan memperoleh hasil sebesar **91,26 (sangat puas)**, dengan hasil tersebut realisasi yang diperoleh bagian keuangan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu dengan kategori Puas (71%-85%).

Dengan capaian yang telah diperoleh oleh bagian keuangan maka dapat membantu tercapainya sasaran output Biro Umum.

c. Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana internal

Tabel 3.14. Indikator Kinerja Kegiatan ke -5

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
5.	Layanan Sarana dan Prasarana internal	Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	Persentase	80	Capaian indikator diambil dari persentase pemenuhan sarpras yang dibandingkan dengan kebutuhan unit kerja yang telah dirasionalisasi dengan inventarisasi barang yang telah ada di periode sebelumnya	$IKU \text{ Sarpras Internal} = \frac{\text{Jumlah Sarpras yang diadakan}}{\text{Jumlah Rasionalisasi}} \times 100\%$

Anggaran awal Layanan Sarana Internal sebesar Rp 7.069.901.000,00 dengan target 535 unit yang meliputi kantor pusat maupun kantor penghubung.

- Sementara Jumlah Kebutuhan riil di internal KY berdasarkan permintaan unit + pimpinan = **548 unit**
- Analisis Prediksi Barang diperoleh dari perbandingan pagu awal ketersediaan anggaran dengan harga rata-rata per/ unit

$$\text{Jumlah Prediksi Barang} = \frac{\text{Total Pagu Anggaran Tersedia}}{\text{Harga rata - rata per unit}}$$

- Analisis Jumlah Rasionalisasi awal kebutuhan internal terhadap sarana prasarana dilakukan melalui nilai rata-rata penjumlahan antara Jumlah prediksi barang dengan Jumlah kebutuhan riil

$$\text{Jumlah Rasionalisasi} = \frac{\text{Jumlah Prediksi Barang} + \text{Jumlah Kebutuhan Riil}}{2}$$

Penghitungan IKU :

$$\text{IKU Sarpras Internal} = \frac{\text{Jumlah Sarpras yang diadakan}}{\text{Jumlah Rasionalisasi}} \times 100\%$$

- $\text{Jumlah Prediksi barang} = \frac{\text{Rp } 7.069.901.000}{\text{Rp } 12.900.000} = 548 \text{ unit}$
- $\text{Jumlah Rasionalisasi} = \frac{548 \text{ Unit} + 535 \text{ unit}}{2} = 542 \text{ Unit}$

$$\text{IKU Sarpras Internal} = \frac{533 \text{ Unit}}{542 \text{ Unit}} \times 100\% = 98.3 \%$$

d. Kegiatan Layanan Umum

Indikator Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]

Tabel 3.15. Indikator Kinerja Kegiatan ke -6

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
6.	Layanan Umum	Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]	Kategori	Memuaskan	Indikator pengukuran diperoleh dari kepuasan pihak yang mendapatkan layanan Protokoler, Tata Usaha/Kearsipan, Rumah tangga. Nilai dalam kategori merupakan gabungan hasil survei dari tiga unsur dimaksud.	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% - 85%), • Cukup Puas (56% - 70%), • Tidak Puas (25.00 - 64.99)

Penjelasan Proses :

- Tingkat Layanan rumah tangga / perkantoran sebesar = 84.94
- Tingkat Layanan Protokol sebesar = 85.92
- Tingkat Layanan Tata Usaha sebesar = 85.94

Maka penghitungan IKU menjadi :

IKU Layanan Umum

$$= \frac{\text{Tingkat Kepuasan [Layanan Rumah tangga + Protokol + Tata Usaha]}}{3 \text{ Layanan}}$$

$$\text{IKU Layanan Umum} = \frac{84.94 + 85.92 + 85.94}{3} = 85.6 \text{ [Nilai layanan umum]}$$

No.	Layanan	Jumlah Responden 2023	Hasil	
			2022	2023
1.	Perkantoran/Rumah Tangga	125 orang	82.57	84.94
2.	Protokol	41 orang	83.81	85.92
3.	Tata Usaha/Persuratan	103 orang	85.18	85.94
Total Rata-rata nilai layanan umum			83.52	85.6

Pada layanan umum yang diketahui dikontribusikan dari 3 unsur utama, tahun 2023 adalah waktu dimana capaian mengalami peningkatan hasil layanan yang dibuktikan dengan survey pada masing-masing bidang. Menggunakan standar survey yang sama yaitu Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, rata-rata peningkatan tercapai sebesar 2.08 poin, sehingga capaian sebelumnya pada 2022 sebesar 83.52 menjadi **85.6** pada 2023.

Dari sisi layanan protokol beberapa upaya signifikan yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja yaitu melalui koordinasi intens dan terus menerus dengan panitia kegiatan, para sekretaris dan Biro/Pusat untuk mengetahui agenda pimpinan serta diupdate setiap hari, meski begitu dukungan peralatan, transportasi, serta SDM menjadi semakin urgent tiap harinya.

Sementara dari sisi layanan tata usaha, kebutuhan terhadap fasilitas semakin besar untuk pelaksanaan tugas, operasionalisasi proses surat masuk dengan menggunakan aplikasi SRIKANDI dan penandatanganan dokumen pimpinan bisa dilakukan dengan tanda tangan elektronik.

Tabel 3.16. Indikator Kinerja Kegiatan ke - 7

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
7.	Layanan Umum	Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	Kategori	Sangat Baik/A	Indikator pengelolaan arsip ANRI diambil dari hasil penilaian ANRI berdasarkan: • PP No. 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Skor ANRI menggunakan 5 kategori, dengan masing-masing kategori merupakan akumulasi dan rata-rata nilai kinerja para pemegang JFT Arsiparis, yaitu: • Sangat Baik (91 - ke atas), • Baik (76 - 90), • Cukup (61 - 75), • Kurang (51 - 60)

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
					<ul style="list-style-type: none"> • Permenpan & RB No. 48 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Tertentu Arsiparis • Peraturan Kepala (PerKa) BKN No. 1 tahun 2013 tentang Ketentuan pelaksanaan PP No. 46 tahun 2011 <p>Parameter eksternal yang secara rutin mengukur tentang standar kearsipan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Buruk (50 ke bawah)

Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI No. B-AK.01.00/6191/2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan tahun 2023, Komisi Yudisial memperoleh nilai sebesar 94.46 dengan kategori AA [Sangat Memuaskan], dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.22. Detail Nilai Akumulasi Pengawasan Arsip

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2023	Bobot	NHP x bobot
Eksternal	91.72	60%	55.03
Internal	98.57	40%	39.43
Nilai Akumulasi			94.46

Pada tahun 2023 memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2022 yang lalu, yaitu dengan skor **94,46** dengan kategori “AA” (Sangat Memuaskan) atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 4.21 dari hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, peningkatan ini relatif dalam hal poin dengan tetap mempertahankan penilaian pada kategori AA “sangat memuaskan”.

Melalui surat yang sama, ANRI mengingatkan beberapa hal yang perlu ditingkatkan kedepan dalam pengelolaan Arsip di Komisi Yudisial RI, antara lain:

1. Pemberian penghargaan kearsipan bagi sumber daya manusia kearsipan;
2. Penyerahan arsip statis ke ANRI yang mewakili seluruh fungsi instansi;
3. Partisipasi aktif dan pelaksanaan seluruh tanggung jawab sebagai anggota simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
4. Pelaporan dan penyerahan arsip penanganan COVID-19 ke ANRI;
5. Perencanaan kebutuhan SDM dan pemenuhannya baik kuantitas maupun kompetensinya; dan

6. Penyediaan prasarana dan sarana kearsipan sesuai standar Perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) kearsipan sehingga dapat menjamin ketersediaan SDM Kearsipan yang memenuhi kompetensi dan sesuai dengan analisis kebutuhan.

Analisis Meningkatnya kualitas layanan internal

1) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Berikut ini tabulasi perbandingan capaian 6 indikator yang berkontribusi pada sasaran kinerja meningkatnya kualitas layanan internal

INDIKATOR	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1) Penilaian penghubung berkinerja baik	B [batas atas 86%]	A [sangat baik = 89.57%]	104%	B [batas atas 86%]	A [sangat baik = 88.63%]	103%
2) Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3) Tingkat kepuasan layanan keuangan	Puas [Batas atas 88.3]	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 89.42]	101%	Puas [Batas atas 88.3]	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 91.26]	103%
4) Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	80 %	97.4%	121%	90 %	98.3%	109%
5) Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]	Memuaskan [Batas atas 88.3]	PUAS [Skor = 83.52]	94.5%	PUAS [Batas atas 88.3]	PUAS [Skor = 85.6]	96.9%
6) Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	Baik /B [Batas atas 90]	B / BAIK [Skor = 90.25]	100%	Sangat Baik/Memuaskan [Batas bawah 100]	AA / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 94.46]	94%

4 kategori hasil penilaian sebagai berikut:

1. Melebihi Detail target, Persentase capaian naik dari tahun sebelumnya:

- Indikator Tingkat kepuasan layanan keuangan, melebihi target sebanyak 2,96%, sementara persentase capaian naik 2% dari tahun sebelumnya;

2. Melebihi Detail Target, Persentase capaian turun dari tahun sebelumnya:

- Indikator Penilaian Kinerja Penghubung, melebihi target sebesar 2,63%, skor asli turun 0.94 poin dari tahun sebelumnya, capaian turun 1% dari tahun sebelumnya;
- Indikator pengadaan Sarpras internal, melebihi target dengan persentase signifikan sebesar 8.3% sekaligus kenaikan skor sebanyak 0.9 poin, namun dari sisi capaian turun dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 12%
- Indikator TU kearsipan, mampu melebihi target sebesar 3.46 poin, juga kenaikan skor sebesar 4.21 poin, namun dari sisi capaian turun sebesar 6% dari tahun sebelumnya.

3. Memenuhi Detail target, Persentase capaian stabil dari tahun sebelumnya:

- Indikator Layanan Adm keuangan, telah memenuhi target secara proporsional sekaligus. Dengan pencapaian stabil setiap tahunnya

4. Memenuhi Kategori Target, namun belum Detail target, Persentase capaian naik dari tahun sebelumnya:

- Indikator Tingkat kepuasan Layanan umum, belum mampu memenuhi target dengan kekurangan sekitar 2.7%, namun dari sisi realisasi mencapai kenaikan skor sebesar 2.08 poin sekaligus kenaikan capaian sebesar 2.4% dari tahun sebelumnya;

Dari seluruhnya jika dilakukan perhitungan rata-rata, maka akan diperoleh hasil, pada tahun 2023, sebagaimana berikut:

$$= \frac{103 + 100 + 103 + 109 + 96.9 + 94}{6 \text{ Indikator}} = 100.4 \% \rightarrow \text{Rata - rata capaian}$$

2) Analisis Perbandingan Capaian dan Realisasi dengan beberapa tahun sebelumnya (2020 s.d. 2023)

SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	2020		2021		2022		2023	
		REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan kualitas layanan internal	1) Penilaian penghubung berkinerja baik	A [sangat baik = 95.51%]	111%	A [sangat baik = 95.51%]	111%	A [sangat baik = 89.57%]	104%	A [sangat baik = 88.63%]	103%
	2) Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
	3) Tingkat kepuasan layanan keuangan	PUAS Skor 70.59%	86%	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 93.6]	106%	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 89.42]	101%	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 91.26]	103%
	4) Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	80%	100%	80.1%	100%	97.4%	121%	98.3%	109%
	5) Tingkat kepuasan layanan umum [protokol, tata usaha, rumah tangga]	Baik/Puas [Skor = 63.98]	102.3%	Cukup [Skor = 76.93]	100%	PUAS [Skor = 83.52]	94.5%	PUAS [Skor = 85.6]	96.9%
	6) Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	A/BAIK /MEMUASKAN Skor 86.87	124.1%	A /BAIK MEMUASKAN [Skor = 80.62]	115%	A/BAIK MEMUASKAN [Skor = 90.25]	100%	AA / SANGAT BAIK/SANGAT MEMUASKAN [Skor = 94.46]	94%

Perbandingan kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan tren pada 3 tahun (2020 s.d. 2022) terakhir:

- Penilaian penghubung berkinerja baik
Persentase Capaian pada tahun 2023 maupun skor realisasi pada 3 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang relatif signifikan terutama pada antara tahun 2021 s.d. 2022 sebesar 5.94 poin dari realisasi, sementara pada tahun 2023 tren penurunan berhasil ditekan menjadi hanya 0.94 poin saja.
- Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar

Capaian maupun realisasi bisa dinarasikan mengalami tren yang relatif konstan, dimana layanan keuangan memang memiliki karakter seperti dimaksud, karena jika terdapat penurunan maka konsekuensinya memiliki pengaruh pada hasil audit keuangan.

- c) **Tingkat kepuasan layanan keuangan**
Sementara dari sisi konsumen persentase capaian maupun skor realisasi mengalami tren yang fluktuatif dimana pada tahun tertentu seperti tahun 2021 mengalami kenaikan signifikan, namun pada tahun 2022 justru turun, dan baru kembali naik di 2023.
- d) **Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan**
Persentase capaian mengalami tren fluktuatif, namun dari sisi realisasi mengalami kenaikan yang relatif konsisten sedikit demi sedikit.
- e) **Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]**
Kondisi yang sama terjadi sebagaimana pada persentase sarpras, dimana Persentase capaian mengalami tren fluktuatif, namun dari sisi realisasi terus menerus mengalami kenaikan.
- f) **Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI**
Dari sisi persentase capaian secara konstan mengalami penurunan dari 124% di 2020 menjadi 94%, sementara dari sisi realisasi justru mengalami kenaikan yang juga secara konsisten, yaitu dengan skor 86.67 di 2020 menjadi skor 94.46 di tahun 2023.

3) Analisis keberhasilan/kegagalan

Sebagian besar realisasi kinerja tetap dapat dipertahankan pada tingkat yang sesuai target atau bahkan lebih, namun dari sisi capaian relatif lebih banyak turun dari tahun sebelumnya, lantaran beberapa standar yang telah lebih mapan.

Hambatan dan permasalahan

Keterbatasan sarpras dan fasilitas jadi issue serius yang menjadi hambatan penyelesaian pekerjaan pada masing-masing indikator.

Langkah-langkah antisipatif yang diambil

Pemanfaatan dan optimalisasi anggaran untuk kelengkapan sarana prasarana juga fasilitas untuk memaksimalkan kinerja unit.

4) Analisis Perbandingan dengan Kinerja Level Nasional

Predikat WTP 16 kali berturut-turut. [Diadopsi menjadi IKU Sekjen]

Tahun 2023 Komisi Yudisial kembali meraih prestasi dalam pengelolaan keuangan negara, dimana berhasil mengantarkan Komisi Yudisial meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-16 kali secara berturut-turut hal ini sesuai dengan surat nomor 78/S/V-XVI.I/05/2023 perihal Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan KY Tahun 2022 perihal bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2022, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 78 /S/V-XVI.1/05/2023
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2022

Jakarta, 31 Mei 2023

**Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
Jalan Kramat Raya Nomor 57
Jakarta Pusat 10450**

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2022, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Komisi Yudisial dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2022 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial Tahun 2022.

Pengawasan Arsip Nasional [digunakan dalam IKU Biro Umum]

Pada tahun 2023 memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2022 yang lalu, yaitu dengan skor 94,46 dengan kategori "AA" (Sangat Memuaskan) atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 4.21 dari hasil pengawasan kearsipan tahun 2022, peningkatan ini relatif dalam hal poin dengan tetap mempertahankan penilaian pada kategori AA "sangat memuaskan".



KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-AK.01.00/6191/2023 Jakarta, 27 Desember 2023
Sifat : Segera
Lampiran : Dua Halaman dan Satu Eksemplar
Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023

Yth. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia
di
Jakarta

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40% sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Selanjutnya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2023 ANRI juga melaksanakan pengawasan Pengelolaan Arsip Elektronik sebagai indeks Tingkat Digitalisasi Arsip dalam Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB General) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Reformasi Birokrasi.

Adapun hasil pengawasan pengelolaan arsip elektronik yang merupakan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI

Nomor 392 Tahun 2023 tentang Nilai Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023. Nilai tingkat digitalisasi arsip pada Komisi Yudisial Republik Indonesia sebesar **87,62 (delapan puluh tujuh koma enam dua)** dengan kategori **A (Memuaskan)** telah disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta telah diinput pada portalrb.menpan.go.id.

Hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal Tahun 2023 pada Komisi Yudisial Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI telah ditetapkan nilai hasil pengawasan kearsipan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI nomor 419 Tahun 2023 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Provinsi Tahun 2023 adalah sebesar **94,46 (sembilan puluh empat koma empat enam)** dengan kategori **"AA (Sangat Memuaskan)"** dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2023	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	91,72	60%	55,03
Internal	98,57	40%	39,43
Nilai Akumulasi			94,46

Nilai hasil pengawasan kearsipan internal merupakan nilai rata-rata yang diperoleh unit pengolah di lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dengan hasil tersebut perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan internal secara terus-menerus sehingga dapat meningkatkan nilai hasil pengawasan kearsipan internal.

Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan eksternal di Komisi Yudisial Republik Indonesia, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Eksekutif dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

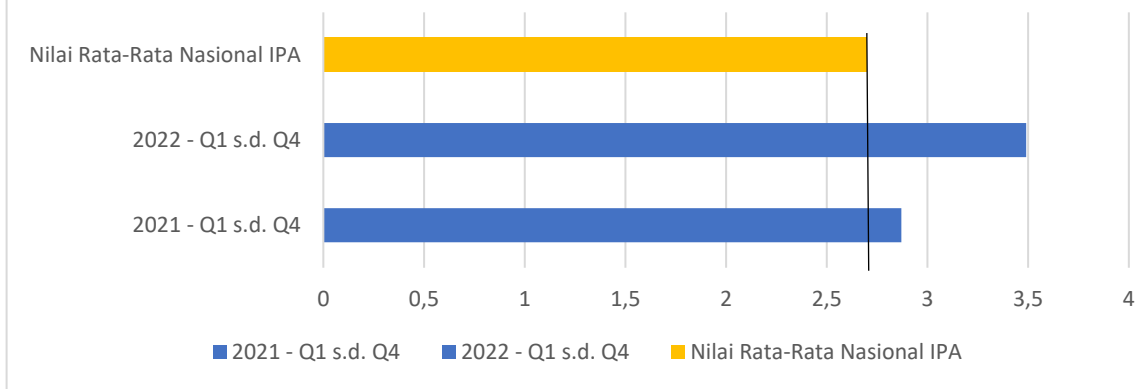
Kami sangat mengapresiasi upaya Bapak beserta seluruh jajaran untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap hasil pengawasan atas kualitas penyelenggaraan kearsipan dapat mendukung pencapaian kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Sementara itu, penting juga untuk dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator yang belum masuk hitungan dalam Renstra karena pemberlakuannya yang relatif baru muncul di antara tahun 2020 s.d. 2021, antara lain :

A. Indeks Pengelolaan Aset [IPA]

Capaian signifikan lain pada dua tahun terakhir yaitu mengenai pengelolaan BMN, dimana pada dimulainya penilaian dari lembaga luar mengenai kinerja pada kerja-kerja Perumga yaitu penilaian Indeks Pengelolaan Aset dari Kemenkeu. capaian nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar mengalami kenaikan signifikan sebesar 62 poin, dimana pada tahun 2021 dari Triwulan pertama (Q1) s.d. triwulan empat (Q4) dicapai skor IPA sebesar 2.87, sementara pada 2022 dicapai peningkatan skor IPA dari Q1 s.d. Q4 sebesar 3.49, dimana nilai dimaksud berada dalam posisi di atas nilai rata-rata nasional yang diperoleh seluruh K/L, sebagaimana tabulasi berikut:

Skor IPA



B. ITKP [Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa]

Dalam bidang pengadaan barang dan jasa, Komisi Yudisial khususnya UKPBJ masih terus berupaya keras untuk mampu mengejar target pada kategori BAIK pada penilaian ITKP. Dimana pada 2023 tata kelola Pengadaan KYRI masih berada pada Kategori KURANG dibawah 50, dengan skor **18.56**, namun naik dari tahun sebelumnya sebanyak 3.56 dengan skor 15. Oleh karenanya, Komisi Yudisial berupaya mengejar kelulusan Ujikom JFT PBJ, sebagai salah satu punggkit Signifikan dalam nilai ITKP ini.

K/L/Pemda: Komisi Yudisial

(1) ▾



C. Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran [IKPA]

Perkembangan baik juga ditemui pada kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dengan nilai akhir diperoleh sebesar **89.81** yang berarti mendapatkan kategori BAI. Capaian ini merupakan peningkatan yang dari tahun sebelumnya dengan selisih sebanyak 3.01 poin dengan nilai 86.8



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KOMISI YUDISIAL RI

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	133	100	439479	KOMISI YUDISIAL RI	Nilai	100.00	61.99	89.58	89.53	80.00	96.49	85.00	99.38	89.81	100%	89.81
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.20	17.92	8.95	8.00	9.65	4.25	24.85			
					Nilai Aspek	81.00		88.12					99.38			



Leveling Nilai IKPA Unit Organisasi K/L



Predikat Nilai IKPA (PER-5/PB/2022)

Nilai Kinerja: 0 – 100 (maksimal)	
Kategori Nilai	
nilai IKPA ≥ 95	😊 A. Sangat Baik
89 ≤ nilai IKPA < 95	😊 B. Baik
70 < nilai IKPA < 89	😐 C. Cukup
nilai IKPA < 70	😞 D. Kurang

5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	KRO	RO	Capaian output	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO	Efisiensi RO Satker= $\frac{\sum((AAKRO \times CRO) - RAKRO)}{\sum(AAKRO)}$
	3867.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)		96.848.706.000	96.049.773.370	100,0%	96.848.706.000	798.932.630	
Tingkat kepuasan layanna umum (protokol, tata usaha dan rumah tangga)	3867.EBA.001	Layanan Tata Usaha	100%	158.828.000	143.293.329	100,0%	158.828.000	15.534.671	2,68%
	3867.EBA.003	Layanan Barang dan Jasa	100%	250.000.000	241.261.811	100,0%	250.000.000	8.738.189	
	3867.EBA.956	Layanan BMN	100%	600.000.000	588.559.466	100,0%	600.000.000	11.440.534	
	3867.EBA.959	Layanan Protokoler	100%	910.200.000	908.568.568	100,0%	910.200.000	1.631.432	
	3867.EBA.962	Layanan Umum	100%	600.000.000	569.757.568	100,0%	600.000.000	30.242.432	
Tingkat kepuasan layanan perkantoran	3867.EBA.994	Layanan Perkantoran	100%	94.329.678.000	93.598.332.628	100,0%	94.329.678.000	731.345.372	0,78%
Persentase jumlah saranan dan prasarana internal yang diadakan	3867.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		7.069.901.000	7.026.252.049	100,0%	7.069.901.000	43.648.951	0,62%
Penilaian penghubung berkinerja baik	3867.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	3.860.715.000	3.827.669.800	100,0%	3.860.715.000	33.045.200	0,86%
1. Layanan administrasi keuangan sesuai standar 2. Tingkat kepuasan layanan keuangan	3867.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	100%	1.400.000.000	1.386.967.574	100,0%	1.400.000.000	13.032.426	0,93%
Pengelolaan arsip sesuai Standar ANRI	3867.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100%	673.672.000	652.026.667	100,0%	673.672.000	21.645.333	3,21%

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya, rentang nilai diukur dari - 20% s.d. 20%, semakin minus semakin buruk, semakin mendekati 20% semakin baik. Dalam hal ini kualitas layanan internal memiliki efisiensi anggaran dengan nilai yang cukup tinggi yaitu sebesar 2.68%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada sasaran kinerja Meningkatkan kualitas layanan internal, Biro umum mampu mempertahankan capaian sekaligus memenuhi target, namun dari sisi persentase capaian memang sebagian besar relatif menurun dari tahun sebelumnya hal ini dilatar belakangi karena batas target yang ditetapkan juga meningkat. Faktor dominan yang menjadi pengungkit keberhasilan ini rata-rata dipengaruhi oleh perbaikan layanan sebagai akibat dari perapihan SOP, penggunaan otomasi sistem, dan adopsi indikator level nasional yang meskipun belum dimasukkan ke dalam Renstra Biro atau lembaga;

3. Sasaran Kinerja Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM

Indikator Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018]

Tabel 3.23. Indikator Kinerja Kegiatan ke - 8

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
8.	Pengelolaan dan Pengembangan SDM	Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018]	Nilai	290	Nilai Sistem Merit diambil dari hasil penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara [KASN] berdasarkan Per Menpan No. 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.	Nilai sistem Merit menggunakan 4 kategori, dengan Kategori - Nilai - Sebutan, sebagai berikut: • IV - 325 s.d. 400 - Sangat Baik • III - 250 s.d. 324 - Baik • II - 175 s.d. 249 - Kurang • I - 100 s.d. 174 - Buruk

Berdasarkan penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Komisi Yudisial pada tahun 2023, Komisi Yudisial memperoleh nilai penilai **345** dengan kategori **Sangat Baik**. Dimana nilai tersebut melampau target yang telah ditetapkan dalam Renstra Komisi Yudisial 2019-2024. Hasil ini, menjadikan Komisi Yudisial RI tergabung diantara 18 Instansi Lembaga non-target Prioritas Nasional dengan Nilai Sistem Merit Baik/Sangat Baik.

Indikator Tingkat Kepuasan Layanan Kepegawaian

Tabel 3.24. Indikator Kinerja Kegiatan ke - 9

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
				2023		
9.	Pengelolaan dan Pengembangan SDM	Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	Persentase	84% [Puas]	Indikator pengukuran diperoleh dari kepuasan pihak yang mendapatkan pelayanan bagian kepegawaian, baik substansi maupun administrasi [tidak terbatas hanya pada berbeda unit kerja/biro]	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: • Sangat Puas (88.31 – 100), • Puas (76.61 – 88.30), • Cukup Puas (65 – 76.60), • Kurang Puas (25 – 64.99)

Tabel 3.25. Interpretasi Skor Penilaian Survei Layanan Kepegawaian

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Interpretasi
25 – 64.99	D	Tidak Puas
65.00 – 76.60	C	Kurang Puas
76.61 – 88.30	B	Puas
88.31 - 100	A	Sangat Puas

Analisis Sasaran Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM

- **Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022**

INDIKATOR	2022			2023		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
7) Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018]	260	261.5	100%	290	345	118.9%
8) Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	PUAS [Target 88,3]	PUAS [Skor 82.23%]	93,2%	PUAS [Target 88,3]	PUAS [Skor 85.94%]	97.3%

- Analisis Perbandingan Capaian dan Realisasi dengan beberapa tahun sebelumnya (2020 s.d. 2023)

SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	2020		2021		2022		2023	
		REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pengelolaan dan Pengembangan SDM	1) Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018]	138	69%	261.5	113%	261.5	100%	345	118.9%
	2) Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	PUAS [Skor = 67.05]	87%	PUAS [Skor 83.98%]	104%	PUAS [Skor 82.23%]	93,2%	PUAS [Skor 85.94%]	97.3%

Kedua indikator pada sasaran ini mengalami persentase capaian yang fluktuatif, namun dari sisi realisasi diperoleh kenaikan skor secara signifikan, yang berarti kinerja terus meningkat dari tahun ke tahun.

- Analisis Perbandingan dengan Kinerja Level Nasional

Nilai Sistem Merit

Nilai sistem merit secara berkala diukur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara [KASN], dimana pada tahun 2023 untuk Komisi Yudisial RI tergabung diantara 18 Instansi Lembaga non-target Prioritas Nasional dengan Nilai Sistem Merit Baik/Sangat Baik, dimana KYRI meraih nilai **Sangat Baik** di tahun 2023 dengan nilai **345**.

18

LEMBAGA NON TARGET PRIORITAS NASIONAL DENGAN NILAI SISTEM MERIT BAIK/SANGAT BAIK



	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) 392,5 Sangat Baik		Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) 342 Sangat Baik		Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) 306,5 Baik
	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 363 Sangat Baik		Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) 335,5 Sangat Baik		Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 305,5 Baik
	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 361,5 Sangat Baik		Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 329 Sangat Baik		Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) 283,5 Baik
	Badan Intelijen Negara (BIN) 355 Sangat Baik		Sekretariat Kabinet 366,5 Sangat Baik		Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 278 Baik
	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI) 345 Sangat Baik		Kejaksaan Agung 329 Sangat Baik		Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) 270 Baik
	Ombudsman Republik Indonesia (ORI) 342,5 Sangat Baik		Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) 329 Sangat Baik		Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) 255 Baik

Sumber: Anugerah Meritokrasi tahun 2023

Indeks Profesionalitas ASN

Dari sisi sasaran Meningkatnya Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM, terdapat 1 indikator lagi yang dikontribusikan dari Biro Umum namun ditarik untuk diadopsi menjadi IKU Sekjen, yaitu Indeks Profesionalitas ASN, yang pengukurannya dilakukan melalui sistem oleh BKN. Perkembangan signifikan ditemui pada Indeks Profesionalitas ASN, dimana pada tahun 2023 Komisi Yudisial mendapati hasilnya pada Kategori TINGGI dengan nilai **81.58**. Hal ini merupakan lonjakan yang jauh dari tahun sebelumnya yaitu 50.53 dengan kategori SANGAT RENDAH.



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 236/BM.02/SD/C.II/2023 Jakarta, 6 November 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022


Yth.
Kepala Biro Umum
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
di
Jakarta

Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor 386/UM/KP.07.02/10/2023 perihal Permohonan Data Nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan nilai Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dari 193 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diukur sebesar 81,58. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berada pada kategori tinggi. Berikut capaian dari setiap dimensi:

1. Dimensi Kualifikasi : 21,52
2. Dimensi Kompetensi : 30,47
3. Dimensi Kinerja : 24,59
4. Dimensi Disiplin : 5,00

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jabatan ASN,

 Dihadangani Secara Elektronik
Sri Gantni, S.Sos, M.AP
NIP. 197403111999022001



Tembusan :
1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan.

- **Analisis keberhasilan/kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternatif Solusi**

Data kinerja menunjukkan bahwa terdapat 2 indikator yang mengalami penurunan dari sisi capaian, yaitu:

a. Melebihi Detail target, Persentase capaian naik dari tahun sebelumnya

Tingkat kepuasan layanan kepegawaian, diketahui belum dapat memenuhi dengan kekurangan sebanyak 3.36 poin, namun dari sisi skor mengalami kenaikan sebesar 2.24 poin sekaligus mengalami kenaikan capaian sebesar 4.1% dari tahun sebelumnya.

b. Memenuhi Kategori Target, namun belum Detail target, Persentase capaian naik dari tahun sebelumnya:

Indikator Nilai Sistem merit, melebihi target sebanyak 55 poin dan mengalami kenaikan skor sebanyak 83.5 poin, sekaligus mengalami kenaikan persentase capaian sebesar 18.9% dari tahun sebelumnya;

Hambatan dan permasalahan

Dalam catatan terhadap Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Merit (Penilaian) di Lingkungan Sekjend. KY RI Tahun 2022, terdapat 2 antara lain aspek yang masih belum optimal dipenuhi, yaitu:

Pengembangan Karir, 73% terpenuhi;

- Menetapkan SKJ Manajerial dan Soskul setiap Jabatan dan SKJ Teknis untuk seluruh Jabatan;
- Profiling Kompetensi (memperluas assessment) Seluruh Pegawai;
- Membangun Manajemen Talenta (talent pool dan rencana suksesi);
- Analisis Kesenjangan guna Pengembangan Kompetensi yang terencana baik Klasikal dan Non-Klasikal dalam rangka Pemenuhan Bangkom Pegawai;

Sistem Informasi, 79% Terpenuhi;

- Meningkatkan Fungsi SI untuk Mendukung Pengelolaan Data Terintegrasi dan Pelayanan Kemudahan bagi Pegawai;

5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Uraian	KRO	RO	Capaian output	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO	Efisiensi RO Satker= $\frac{\sum((AAKRO \times ((CRO)^{(1/n))} - RARO))}{\sum(AARO)}$
1. Nilai Sistem Merit (Permenpan No 40 Tahun 2018)	3867.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		3.344.579.000	3.318.960.967	112,9%	3.776.843.209	457.882.242	13,69%
	3867.EBC.001	Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata kehakiman	100%	550.260.000	546.443.630	100,0%	550.260.000	3.816.370	
2. Tingkat kepuasan layanan kepegawaian /SDM	3867.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	120%	1.238.527.000	1.225.531.369	120,0%	1.486.232.400	260.701.031	
	3867.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	120%	1.555.792.000	1.546.985.968	120,0%	1.866.950.400	319.964.432	

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya, rentang nilai diukur dari - 20% s.d. 20%, semakin minus semakin buruk, semakin mendekati 20% semakin baik. Dalam hal ini Layanan pengelolaan dan pengembangan SDM memiliki efisiensi anggaran dengan nilai tertinggi dibandingkan dengan layanan yang lain dengan nilai efisiensi sebesar 13.69%.

6) Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Beberapa hal yang dapat dijelaskan mengenai kenaikan signifikan pada sasaran ini, antara lain:

1. Terdapat perubahan komponen penilaian di BKN pada dimensi kualifikasi, sebelumnya kualifikasi tidak menyesuaikan jabatan, saat ini dibuat menyesuaikan jabatan

7) Pada tahun sebelumnya di Komisi Yudisial tidak terdapat program pengembangan SDM, sehingga perolehan nilai menjadi sangat kecil. Program pengembangan mulai dinisiasi pada tahun 2022 dan berlanjut hingga saat ini.

2. Sasaran Kinerja 4 - Meningkatnya layanan perkantoran

Indikator Tingkat kepuasan layanan perkantoran

Tabel 3.27. Indikator Kinerja Kegiatan ke - 10

NO	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Penjelasan Indikator	Formulasi
10.	Layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Kategori	Puas	Indikator pengukuran diperoleh dari kepuasan pihak yang mendapatkan pelayanan pada mata anggaran Operasionalisasi dan Pemeliharaan Kantor	Skor Di dapat dari survei Eksternal dengan menggunakan skala linked dengan empat (4) rentang, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Sangat Puas (86% - 100%), • Puas (71% - 85%), • Cukup Puas (56% - 70%), • Kurang Puas (41% - 55%)

Berdasarkan Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 90% dengan tingkat kesalahan sebesar/Margin Error 10%, dengan N Populasi sebesar = 340 orang dan dengan minimum sampling Responden sejumlah 125 orang. Berdasarkan Pedoman penyusunan Permenpan No. 14 tahun 2017, pada halaman 21 dinyatakan bahwa unit pelayanan bisa menambah unsur pelayanan utama dalam quisioner maupun memberikan bobot berbeda pada tiap-tiap unsur, maka dari itu sesuai kebutuhan unit rumah tangga dan perlengkapan kami melakukan dua hal, yaitu:

1. Menambah unsur pelayanan, dari 9 unsur kepada 11 unsur
2. Memberikan bobot yang berbeda pada masing-masing unsur, dengan 5 unsur yang dititikberatkan

Hasil keseluruhan dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan publik terhadap layanan perkantoran KY berada pada kategori B (baik) atau dapat juga dibahasakan pada kategori PUAS sebagaimana diksi yang digunakan pada tabel kinerja Renstra Biro Umum 2020 s.d. 2024

Tabel 3.28. Penghitungan Survei Layanan Perkantoran / Rumah Tangga

TABEL PENGOLAHAN DATA

Unsur	Unsur Pelayanan	Soal	RESPONDEN	Σ Nilai Soal	Σ Nilai Soal / Σ Soal Terisi	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	
U1	Persyaratan	P1	Responden 1	368	2.94	2.94	368	C	Kurang Baik
U2		P2		406	2.24	3.3	413	B	Baik

	Sistem Mekanisme Prosedur	P3	s.d. Responden 186	382	3.05				
		P4		452	3.6				
U3	Waktu Penyelesaian	P5		391	3.12	3.18	397.75	B	Baik
		P6		369	2.95				
		P7		393	3.14				
		P8		438	3.5				
U4	Biaya/Tarif	P9		497	3.97	3.9	497	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan BMN	P10		0	0	3.12	391	B	Baik
		P11		375	3				
		P12		391	3.12				
		P13		407	3.25				
U6	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kerumahtanggaan	P14		447	3.57	3.52	440	B	Baik
		P15		448	3.58				
		P16		426	3.4				
U7	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan	P17		398	3.18	3.25	424.5	B	Baik
		P18		451	3.6				
U8	Kompetensi Pelaksana	P19		415	3.32	3.3	415	B	Baik
U9	Perilaku Pelaksana	P20	412	3.29	3.42	428,33	B	Baik	
		P21	449	3.59					
		P22	424	3.39					
U10	Penanganan Pengaduan	P23	464	3.71	3.84	480	A	Sangat Baik	
		P24	0	0					
		P25	479	3.83					
		P26	494	3.95					
		P27	5	0.04					
U11	Sarana Prasarana	P28	398	3.18	3.1	398	B	Baik	
				Nilai Indeks	3.304	84.94			
				Kinerja Unit Pelayanan	B	BAIK/PUAS			

Nilai Indeks 3.3, Skor 84.94
Kinerja Unit Pelayanan B = BAIK/PUAS

Layanan perkantoran dilakukan oleh Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga dan telah melakukan kinerja secara maksimal dalam memberikan layanan kepada seluruh pegawai Komisi Yudisial, baik dalam mendukung dari segi sarana dan prasarana, kesehatan pegawai dan ketertiban lingkungan pada areal dalam maupun luar gedung kantor Komisi Yudisial. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepuasan terhadap layanan perkantoran mencapai kategori Baik atau Puas dengan nilai 84.94 yang dilakukan oleh bagian perlengkapan dan rumah tangga.

Analisis Meningkatnya layanan perkantoran

1) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022

Perumga khususnya layanan perkantoran, hampir mencapai target dengan kekurangan 3.36 poin, sementara dari sisi capaian naik 2.3% dari tahun sebelumnya. Meski seolah terlihat stabil masih dalam kategori yang sama yaitu kategori Puas, jika diperhatikan lebih dalam, maka diperoleh temuan dimana hasil yang dicapai dalam pelayanan perkantoran terdapat kenaikan signifikan dari selisih dua tahun laporan, yaitu

Aspek	2022	2023
Target	Batas atas 88.3	Batas atas 88.3
Realisasi	82.7	84.94
Capaian	93.8%	96.1%

2) Analisis Perbandingan Capaian dan Realisasi dengan beberapa tahun sebelumnya (2020 s.d. 2023)

SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	2020		2021		2022		2023	
		REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya layanan perkantoran	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	PUAS [Skor = 63.98]	78.7%	PUAS [Skor = 77.7]	87.9%	PUAS [Skor = 82.7]	93.5%	PUAS [Skor = 84.94]	96.1%

Baik persentase capaian maupun skor realisasi pada sasaran ini mengalami kenaikan skor secara signifikan, yang berarti kinerja terus meningkat dari tahun ke tahun.

3) Analisis Perbandingan dengan Kinerja Level Nasional

Sementara ini untuk sektor layanan perkantoran relatif belum ditemukan rujukan indikator yang menjadi acuan secara nasional.

4) Analisis Perbandingan dengan Kinerja Level Nasional keberhasilan/kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja, Alternatif Solusi

Secara umum jika dilihat pada hasil keseluruhan dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan publik terhadap layanan perkantoran KY berada pada kategori B (baik) atau dapat juga dibahasakan pada kategori PUAS sebagaimana diksi yang digunakan pada tabel kinerja Renstra Biro Umum 2020 s.d. 2025. Namun, jika dilihat lebih jauh hasil tersebut diperoleh dari jumlah keseluruhan atas hasil kepuasan dari beberapa tahapan pelayanan perkantoran yang juga beragam. Terdapat beberapa nilai yang turun dibandingkan dengan survey tahun sebelumnya, namun terdapat pula peningkatan signifikan pada beberapa nilai dengan rincian sebagai berikut:

A. Naik signifikan sampai menggeser kategori (dari “kurang baik” ke “Baik”)

- 1) Sistem Mekanisme Prosedur
- 2) Waktu Penyelesaian
- 3) Sarana Prasarana

- 4) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan BMN
- B. Naik skor namun tetap pada kategori yang sama (bertahan di “baik”)
 - 1) Perilaku Pelaksana
 - 2) Penanganan Pengaduan
 - 3) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kerumahtanggaan
- C. Skor turun namun tetap pada kategori yang sama (bertahan pada kategori “baik”)
 - 1) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan
- D. Skor turun sampai menggeser kategori (dari “Baik” ke “Kurang baik”)
 - 1) Persyaratan
- E. Sama tanpa pergeseran skor maupun kategori:
 - 1) Biaya/Tarif
 - 2) Kompetensi Pelaksana

Hambatan dan permasalahan

Kondisi ini dipengaruhi karena Gap yang sangat signifikan antara standar ideal lembaga dengan kemampuan sumber daya dalam memenuhinya merupakan faktor utama turunnya capaian, keterbatasan SDM dan ruang lingkup juga dimensi pelayanan yang relatif luas.

Langkah-langkah antisipatif yang diambil

Bantuan tenaga melalui pengadaan tenaga kontrak pengadaan jasa lainnya ditempuh pada tahun 2022 sebagai bagian dari upaya konkret mengatasi masalah beban kerja.

5) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

RO	Capaian output	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO	Efisiensi RO Satker= $\frac{\sum((AAKRO \times ((CRO)^{(1/n)})) - RAKRO)}{\sum(AAKRO)}$
Layanan Perkantoran	100%	94.329.678.000	93.598.332.628	100,0%	94.329.678.000	731.345.372	0,78%

Dalam hal ini Layanan perkantoran memiliki efisiensi anggaran dengan nilai menengah dengan nilai efisiensi sebesar 0.78%.

TABEL 3.29. Tabulasi Perbandingan Kinerja tahun 2022 – 2023 dan Target 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	2022			2023			TARGET 2024
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Penguatan Kerjasama dan hubungan antar lembaga	Meningkatnya kerjasama dan hubungan antar lembaga	1) Persentase kerjasama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	Naik sebesar 15% = 45%	81,82 %	181,8%	Naik sebesar 15% = 60%	84,61 %	141%	15
2	layanan kinerja penghubung	Meningkatnya kualitas layanan internal	2) Penilaian penghubung berkinerja baik	B [batas atas 86%]	A [sangat baik = 89.57%]	104%	B [batas atas 86%]	A [sangat baik = 88.63%]	103%	Skor A
3	Layanan manajemen keuangan		3) Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Layanan Sarana dan Prasarana internal		4) Tingkat kepuasan layanan keuangan	Puas [Batas atas 88.3]	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 89.42]	101%	Puas [Batas atas 88.3]	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 91.26]	103%	PUAS
5	Layanan Umum		5) Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	80 %	97.4%	121%	90 %	98.3%	109%	100%
			6) Tingkat kepuasan layanan umum [protokoler, tata usaha, rumah tangga]	Memuaskan [Batas atas 88.3]	PUAS [Skor = 83.52]	94.5%	PUAS [Batas atas 88.3]	PUAS [Skor = 85.6]	96.9%	Sangat Memuaskan
			7) Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	Baik /B [Batas atas 90]	B / BAIK [Skor = 90.25]	100%	Sangat Baik/Memuaskan [Batas bawah 100]	AA / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 94.46]	94%	Sangat Baik
6	Pengelolaan dan Pengembangan SDM		Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM	8) Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018]	260	261.5	100%	290	345	118.9%
			9) Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	PUAS [Target 88.3]	PUAS [Skor 82.23%]	93,2%	PUAS [Target 88,3]	PUAS [Skor 85.94%]	97.3%	86
7	Layanan perkantoran	Meningkatnya layanan perkantoran	10) Tingkat kepuasan layanan perkantoran	Puas [batas atas 88.3]	PUAS [Skor = 82.7]	93.5%	Puas [batas atas 88.3]	PUAS [Skor = 84.94]	96.1%	Puas

TABEL 3.30. Tabulasi Perbandingan Realisasi dan Capaian tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya (2020 s.d. 2022)

NO	KEGIATAN	SASARAN KELUARAN (OUTPUT)	INDIKATOR	2020		2021		2022		2023	
				REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN	REALISASI	% CAPAIAN
1	Penguatan Kerjasama dan hubungan antarlembaga	Meningkatnya kerjasama dan hubungan antarlembaga	1) Persentase kerjasama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	57.14%	380%	54,54 %	181,8%	81,82 %	181,8%	84,61 %	141%
2	layanan kinerja penghubung	Meningkatnya kualitas layanan internal	2) Penilaian penghubung berkinerja baik	A [sangat baik = 95.51%]	111%	A [sangat baik = 95.51%]	111%	A [sangat baik = 89.57%]	104%	A [sangat baik = 88.63%]	103%
3	Layanan manajemen keuangan		3) Layanan Adm Keuangan Sesuai Standar	IKPA Skor = 97.57	108%	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %
			4) Tingkat kepuasan layanan keuangan	PUAS Skor 70.59%	86%	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 93.6]	106%	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 89.42]	101%	A / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 91.26]	103%
4	Layanan Sarana dan Prasarana internal		5) Persentase jumlah sarana dan prasarana internal yang diadakan	80%	100%	80.1%	100%	97.4%	121%	98.3%	109%
5	Layanan Umum		6) Tingkat kepuasan layanan umum [protokol, tata usaha, rumah tangga]	Baik/Puas [Skor = 63.98]	102.3%	Cukup [Skor = 76.93]	100%	PUAS [Skor = 83.52]	94.5%	PUAS [Skor = 85.6]	96.9%
			7) Pengelolaan arsip sesuai standar ANRI	A /BAIK/ MEMUASKAN Skor 86.87	124.1%	A / BAIK/MEMUASKAN [Skor = 80.62]	115%	A/ BAIK/MEMUASKAN [Skor = 90.25]	100%	AA / SANGAT MEMUASKAN [Skor = 94.46]	94%
6	Pengelolaan dan Pengembangan SDM		Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengembangan SDM	8) Nilai Sistem Merit [Per Menpan No. 40 tahun 2018]	138	69%	261.5	113%	261.5	100%	345
			9) Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	PUAS [Skor = 67.05]	87%	PUAS [Skor 83.98%]	104%	PUAS [Skor 82.23%]	93,2%	PUAS [Skor 85.94%]	97.3%
7	Layanan perkantoran	Meningkatnya layanan perkantoran	10) Tingkat kepuasan layanan perkantoran	PUAS [Skor = 63.98]	78.7%	PUAS [Skor = 77.7]	87.9%	PUAS [Skor = 82.7]	93.5%	PUAS [Skor = 84.94]	96.1%

C. REALISASI & EFISIENSI ANGGARAN

Pada Tahun 2023, Anggaran Biro Umum Komisi Yudisial sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-100.01-0/2023 tanggal 30 November 2022 adalah sebesar Rp 114.647.573.000,-. Alokasi Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang ada di Biro Umum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Umum selaku unit yang memberikan dukungan terhadap unit teknis di Komisi Yudisial.

Alokasi anggaran tahun 2023 di Biro Umum telah digunakan secara maksimal untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang ada dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan dan pelaksanaan teknis lainnya di Komisi Yudisial. Adapun realisasi penggunaan anggaran Biro Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 113.658.780.718,- atau dengan persentase 99,14%.

Dari tabulasi dibawah dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat efisiensi sebesar 1,20%, dimana peringkat efisiensi terkecil berada pada layanan tingkat kepuasan layanan kerjasama antar lembaga sebesar 0.46% sementara terbesar diperoleh oleh sasaran meningkatnya kualitas layanan pengelolaan dan pengembangan SDM sebesar 13.69%.

Tabel 3.31. Tabulasi Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Sasaran Keluaran (Output)	Uraian	KRO	RO	Capaian output	Alokasi Anggaran (AAKRO)	Realisasi Anggaran (RAKRO)	CRO per KRO	AAKRO x CRO	(AAKRO x CRO) - RAKRO	Efisiensi RO Satker= $\frac{\sum((AAKRO \times ((CRO)^{(1/n)} - RARO)) / \sum(AARO))}{\sum(AARO)}$
		3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial		114.647.573.000	113.704.971.542				1,20%
		3867.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (Base Line)		96.848.706.000	96.049.773.370	100,0%	96.848.706.000	798.932.630	
Layanan Internal	Tingkat kepuasan layanna umum (protokoler, tata usaha dan rumah tangga)	3867.EBA.001	Layanan Tata Usaha	100%	158.828.000	143.293.329	100,0%	158.828.000	15.534.671	2,68%
		3867.EBA.003	Layanan Barang dan Jasa	100%	250.000.000	241.261.811	100,0%	250.000.000	8.738.189	
		3867.EBA.956	Layanan BMN	100%	600.000.000	588.559.466	100,0%	600.000.000	11.440.534	
		3867.EBA.959	Layanan Protokoler	100%	910.200.000	908.568.568	100,0%	910.200.000	1.631.432	
		3867.EBA.962	Layanan Umum	100%	600.000.000	569.757.568	100,0%	600.000.000	30.242.432	
Meningkatnya layanan	Tingkat kepuasan layanan perkantoran	3867.EBA.994	Layanan Perkantoran	100%	94.329.678.000	93.598.332.628	100,0%	94.329.678.000	731.345.372	0,78%
Layanan Internal	Persentase jumlah saranan dan prasarana internal yang diadakan	3867.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		7.069.901.000	7.026.252.049	100,0%	7.069.901.000	43.648.951	0,62%
		3867.EBB.951	Layanan Sarana Internal	100%	7.069.901.000	7.026.252.049				
Meningkatkan Layanan Pengelolaan dan Pengembangan SDM	1. Nilai Sistem Merit (Permenpan No 40 Tahun 2018) 2. Tingkat kepuasana layanan kepegawaian /SDM	3867.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		3.344.579.000	3.318.960.967	112,9%	3.776.843.209	457.882.242	13,69%
		3867.EBC.001	Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata kehakiman	100%	550.260.000	546.443.630	100,0%	550.260.000	3.816.370	
		3867.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	120%	1.238.527.000	1.225.531.369	120,0%	1.486.232.400	260.701.031	
		3867.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	120%	1.555.792.000	1.546.985.968	120,0%	1.866.950.400	319.964.432	
		3867.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		7.384.387.000	7.309.985.156	100,0%	7.384.387.000	74.401.844	
Meningkatnya kerjasama dan hubungan antar lembaga	Persentase kerjasama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim	3867.EBD.001	Monitoring tindak lanjut kerjasama dan hubungan antar lembaga	100%	1.450.000.000	1.443.321.115	100,0%	1.450.000.000	6.678.885	0,46%
Meningkatnya kualitas	Penilaian penghubung berkinerja baik	3867.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	3.860.715.000	3.827.669.800	100,0%	3.860.715.000	33.045.200	0,86%
Layanan Internal	1. Layanan administrasi keuangan sesuai standar 2. Tingkat kepuasan layanan keuangan	3867.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	100%	1.400.000.000	1.386.967.574	100,0%	1.400.000.000	13.032.426	0,93%
Layanan Internal	Pengelolaan arsip sesuai Standar ANRI	3867.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	100%	673.672.000	652.026.667	100,0%	673.672.000	21.645.333	3,21%
					114.647.573.000	113.704.971.542		115.079.837.209	1.374.865.667	

BAB IV. PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Umum ini merupakan uraian yang menggambarkan kinerja Biro Umum di tahun 2023 dalam menjalankan tugasnya untuk dapat memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Komisi Yudisial periode 2020-2024. Program dan kegiatan telah dilaksanakan secara maksimal dan mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Biro Umum Tahun 2023, sebagian besar capaian telah memenuhi atau bahkan melebihi target yang ditetapkan pada tiap-tiap indikator.

Catatan tetap perlu diperhatikan juga disematkan pada perbandingan capaian dari tahun sebelumnya, dimana sekalipun secara kategori Biro Umum mampu mempertahankan predikat capaiannya, namun jika dilihat lebih detail maka beberapa nilai skor pada tiap indikator mengalami penurunan. Selain itu, kedepan Biro Umum perlu menyesuaikan ulang beberapa indikator dengan tingkat reliabilitas yang lebih kuat melalui adopsi pengukuran yang berasal dari lembaga luar, seperti Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran [IKPA], Indeks Pengelolaan Aset [IPA], juga Indeks Kematangan UKPB], terutama IPA yang akan segera diadopsi pada Perjanjian Kinerja Biro di tahun 2024 karena progress pencapaiannya yang relatif baik oleh unit perumga.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fak. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id